

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu tak jarang menyita perhatian banyak pihak, oleh sebab partisipasi politik masyarakat itu menjadi suatu fenomena yang memberi pemahaman tentang perilaku memilih masyarakat.¹

Studi perilaku memilih sesungguhnya bukan merupakan hal baru dalam ilmu politik. Studi ini telah lama berkembang dan menghasilkan temuan-temuan berharga bagi sejumlah negara maju yang tradisi dan kualitas berdemokrasinya sudah berkembang pesat dan terlembaga. Kajian tentang perilaku memilih sebenarnya telah lama dilakukan oleh sejumlah ilmuwan Indonesia dengan fokus kajian pada proses Pemilu yang berhubungan dengan dinamika politik seputar pemilu, kinerja partai politik dan sengketa pemilu.²

Pada konteks pemilihan umum, perilaku memilih merupakan suatu tindakan yang bersifat individual, ini disebabkan adanya otoritas penuh kepada individu yang telah memenuhi persyaratan khusus sebagai warga negara untuk menentukan sendiri pilihan politiknya dalam hal ini pemberian suara (*voting*). Perilaku memilih merupakan salah satu bentuk perilaku politik

¹Ni Ketut Arniti (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Volume 4 Nomor 2. Universitas Pendidikan Nasional. Denpasar. Hal 333

²Frans Bapa Tokan (2019). Analisis perilaku memilih pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro. Semarang. Hal 39

dalam sebuah pemilihan umum. Menurut Ramlan Surbakti perilaku memilih adalah sebagai suatu aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan umum. Bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka voters dengan sendirinya akan menentukan pilihannya kepada kandidat tertentu.³

Orientasi politik secara sederhana dipahami sebagai sebuah keinginan yang hendak dicapai melalui suatu pilihan politik. Kata “orientasi” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat dan sebagainya) yang tepat dan benar.⁴ Menurut Ramlan Surbakti pada dasarnya orientasi politik berhubungan dengan usaha menafsirkan tindakan politik atau peristiwa politik melalui suatu pencarian kebijakan yang tepat dalam mengatasi persoalan politik yang dihadapi. Titik penekanan orientasi politik adalah pada alternatif-alternatif kebijakan serta segala dampaknya, sasaran/tujuan kebijakan, dan kondisi/situasi tatkala kebijakan itu dikeluarkan. Dengan demikian, maka orientasi politik kemudian akan memberi pengaruh yang kuat pada pilihan politik, sebab pilihan politik merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang menentukan alternatif keputusan mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.⁵

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) menurut Sarwiono pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pilkada juga merupakan proses rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang

³ Erna Febriani (2018). Analisis Perilaku Memilih (*Voting Behavior*) Pemilih Pemula Wilayah Jakarta Barat Menjelang Pemilihan Umum 2019. Jurnal Polinter Volume 4 Nomor 1. Program Studi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta. Hal 5

⁴ Heriyono Tardjono (2016). Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. Jurnal Renaissance Volume 1 Nomor 2. Hal 64

⁵Ramlan Surbakti (2010). Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widya Sarana. Hal 92

mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati ataupun walikota/wakil wali kota. Aktor utama sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat, partai politik dan calon kepala daerah. Partai politik menurut Firmanzah sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan luas. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi seorang pemimpin, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Calon pemimpin yang mampu menarik simpatikan perhatian dari masyarakat luas merupakan asset yang sangat berharga bagi partai politik.⁶

Indonesia, termasuk salah satu negara yang sempat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak tahun 2020 sebagaimana dampak dari adanya *corona virus disease 2019 (Covid-19)* menjadi *pandemic* global, dan pada 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Covid 19 ditetapkan sebagai bencana nasional non alam. Pilkada yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada 23 September 2020, mundur menjadi 9 Desember 2020 atau tertunda sekitar 3,5 bulan. Penundaan pelaksanaan pemilihan dilakukan melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.⁷

⁶ Ika Kartika, et, al (2018). Modal Politik Tjhai Chui Mie dalam Pemilihan Walikota Singkawang Tahun 2017. Jurnal Wacana Politik V olume 3 Nomor 2. Universitas Padjajaran. Bandung

⁷ Mohammad Saihu (2020). Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020. Jurnal Etika dan Pemilu Volume 7 Nomor 1. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP). Hal 4

Pilkada tahun 2020 merupakan gelombang keempat atau gelombang terakhir sebelum Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada 2020 merupakan putaran periode pemilihan dari pilkada serentak tahun 2015 yang diikuti sebanyak 269 daerah. Sedangkan untuk Pilkada 2020 diikuti sebanyak 270 daerah, dengan rincian 9 Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur), 37 Kota (Walikota dan Wakil Walikota) dan 224 Kabupaten (Bupati dan Wakil Bupati) atau sekitar 53 persen dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Bertambahnya satu daerah yang menggenapkan 270 daerah yang ikut dalam pilkada tahun 2020 disebabkan oleh gagalnya pasangan calon tunggal mengalahkan kotak kosong pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2018.⁸

Pilkada Manggarai Barat diikuti oleh empat (4) Pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Nomor 65/PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 yaitu Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si - HJ. Andi Riski Nur Cahya D, SH, SH. Yang diusung oleh Partai Demokrat, PKS dan PPP, Drh. Maria Geong, Ph.D - Silverius Sukur, SP yang diusung oleh Partai PDIP, PKB, Gerindra dan Perindro, Edistasius Endi, SE - dr. Yulianus Weng, M.Kes yang diusung oleh Partai Nasdem, Golkar dan PKPI dan Adrianus Garu, SE.MSi - Anggalinus Gapul, SP, MMA yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura). Adapun untuk lebih jelasnya tentang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang bertarung dalam pilkada Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

⁸ Ibid. Hal 3

Tabel 1.1
Profil Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat 2020⁹

Pasangan calon	Partai pengusung	Jumlah kursi	Agama	Etnis	Tagline kampanye
Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si – HJ. Andi Riski Nur Cahya D, SH, SH	Demokrat, PKS dan PPP	6	Katolik/ Islam	Ndoso/ Komodo	Pantas - Riski
Drh. Maria Geong, Ph.D – Silverius Sukur	PDIP, PKB, Gerindra dan Perindo	8	Katolik/ Katolik	Kuwus/ Boleng	Misi
Editasius Endi, SE – Dr. Yulianus Weng, M.Kes	Nasdem, Golkar dan PKPI	10	Katolik/ Katolik	Lembor Selatan/ Komodo	Edi-Weng
Andrianus Garu, SE. MSi – Anggalinus Gapul, SP. MMA	PAN dan Hanura	6	Katolik/ Katolik	Ruteng/ Kuwus	AG

Sumber KPU Manggarai Barat, 2020

Hasil Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Periode 2020-2025 menetapkan pasangan calon Edistasius Endi–Yulianus Weng sebagai pemenang mengungguli pasangan Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si - HJ. Andi Riski Nur Cahya D, SH, SH., Drh. Maria Geong, Ph.D - Silverius Sukur, SP dan Adrianus Garu, SE.MSi - Anggalinus Gapul, SP,MMA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 10/PL.02.7-BA/5315/KPU-Kab/II/2021 tentang penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Pilkada Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020. Adapun hasil perhitungan suara pilkada Kabupaten Manggarai Barat Periode 2020-2025 dapat dilihat pada uraian akumulasi dibawah ini:

⁹KPU Kabupaten Manggarai (2020). Profil Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai

1. Paket Pantas – Riski : 29.593
2. Paket Maria – Sil : 41.459
3. Paket Edi – Weng : 45.057
4. Paket AG – AG : 19.412

Berdasarkan uraian akumulasi diatas pasansgan Editasius Endi, SE – Dr. Yulianus Weng, M.kes Memperoleh kemenagnagan dalam pilkada Manggarai Barat dengan total suara 45.057, adapun penelitian ini lebih memfokuskan pada kemenasgna pasangan Edi-Weng di Kecamatan Komodo.

Alasan dilakukannya penelitian orientasi politik masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Manggarai Barat 2020 di Kecamatan Komodo, didasarkan pada beberapa pertimbangan dan karakteristik pemilih yang sangat beragam dari aspek etnis, agama, pendidikan, pekerjaan serta pengelompokkan dalam berbagai organisasi sosial dan politik, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Dari sisi etnis, kecamatan Komodo merupakan rumah besar sekaligus miniatur Kabupaten Manggarai Barat bagi 3 etnis besar yang ada di Kecamatan Komodo yaitu etnis kolang, kempo dan lembor di samping etnis minoritas lainnya seperti bajo, bima,bugis dan jawa. Adapun representasi tiga etnis besar diatas terepresentasi dalam 4 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat
2. Dari sisi agama, kecamatan Komodo merupakan rumah besar bagi 5 dari 6 agama yaitu Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu, dan Budha. Adapun dari sisi agama, 4 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat terwakili dari agama Kristen Katolik dan Islam
3. Dari sisi Pendidikan, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Manggarai Barat 2020 tentang Kecamatan Komodo dalam Angka 2020 menunjukkan bahwa tidak adanya angka buta huruf

di Kecamatan Komodo. Hal ini menunjukkan bahwa secara intelektual kecamatan komodo dianggap lebih baik dibanding 11 Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga berpengaruh terhadap orientasi politik masyarakat yang sangat beragam dalam memilih baik itu pendidikan SD-S3.

4. Dari sisi pekerjaan, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Manggarai Barat 2020 tentang Kecamatan Komodo dalam Angka 2020 menunjukkan tingkat pekerjaan masyarakatnya sangat beragam, mulai dari Nelayan, Petani, Pedagang, PNS dll, sehingga menurut penulis berpengaruh terhadap orientasi politik masyarakat, dimana masyarakat akan memilih calon yang akan memperjuangkan kepentingan mereka dari aspek pekerjaan.

Atas dasar pemikiran diatas, maka layaklah diangkat topik penelitian dengan judul

:ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN KOMODO DALAM PILKADA PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Orientasi Politik Masyarakat Kecamatan Komodo Dalam Pilkada Pada Masa Pandemi di Kabupaten Manggarai Barat 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisisOrientasi Politik Masyarakat Kecamatan Komodo Dalam Pilkada Pada Masa Pandemi di Kabupaten Manggarai Barat 2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Orientasi Politik dan Perilaku Pemilih bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
- b) Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat Kecamatan Komodo dalam menentukan pilihan politik dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres kedepannya.